

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia merupakan bagian integral dari hubungan internasional kedua negara yang telah berlangsung lama dan meliputi berbagai sektor, termasuk bidang keimigrasian. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, penguatan kerjasama keimigrasian menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas warga negara, memperkuat sistem keamanan perbatasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersifat lintas negara. Salah satu aspek krusial dalam kerjasama ini adalah optimalisasi teknologi dalam pembuatan paspor dan visa, yang menjadi instrumen utama dalam pengelolaan mobilitas penduduk antarnegara.

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan keimigrasian merupakan bagian dari strategi modernisasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data kependudukan dan dokumen perjalanan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan berbagai sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), online visa approval, serta berbagai bentuk layanan daring yang dapat diakses masyarakat secara cepat dan mudah (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023c). Langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan publik yang berbasis digital, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja internal institusi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut layanan yang efektif dan efisien.

Dalam konteks geografis, Kota Tanjungpinang yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia bagian barat menjadi salah satu kawasan strategis dalam hubungan keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia. Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan paspor dan visa menjadikannya sebagai pusat penting dalam mengimplementasikan sistem dan kebijakan keimigrasian nasional yang terintegrasi dengan kepentingan kerja sama antarnegara. Tingginya intensitas perlintasan penduduk, baik melalui pelabuhan internasional maupun jalur laut lainnya, menuntut adanya sistem pelayanan keimigrasian yang responsif, terintegrasi, dan berbasis teknologi mutakhir. Kerja sama keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia juga mencakup pertukaran data keimigrasian, interoperabilitas sistem, hingga harmonisasi kebijakan dalam rangka memperkuat keamanan kawasan dan menanggulangi tantangan keimigrasian yang bersifat lintas batas.

Dalam perspektif keamanan non-tradisional, isu keimigrasian kini dipahami tidak hanya sebagai persoalan administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan stabilitas regional, arus pergerakan manusia, dan risiko pelanggaran hukum yang dapat terjadi akibat kelemahan sistem (ASEAN Secretariat, 2020). Oleh karena itu, optimalisasi teknologi dalam pelayanan paspor dan visa bukan hanya sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam membangun sistem keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Meski demikian, implementasi teknologi dalam pelayanan keimigrasian tidak terlepas dari tantangan teknis dan struktural. Ketersediaan infrastruktur digital

yang belum merata, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya integrasi lintas sistem antarnegara menjadi hambatan yang perlu diselesaikan secara kolaboratif. Oleh karena itu, studi mengenai bentuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam optimalisasi teknologi pembuatan paspor dan visa, khususnya di wilayah strategis seperti Tanjungpinang, menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika, capaian, serta hambatan yang dihadapi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kerja sama yang telah dijalin oleh kedua negara dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian, serta bagaimana peran Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dalam mengimplementasikan kebijakan dan teknologi tersebut secara konkret. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan keimigrasian yang berbasis teknologi, serta memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menciptakan sistem keimigrasian yang modern, aman, dan inklusif.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu bentuk interaksi internasional yang memiliki nilai strategis tinggi, mengingat kedekatan geografis, kedekatan historis, serta intensitas hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antara kedua negara. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pendidikan, tenaga kerja, hingga isu-isu keamanan kawasan. Salah satu sektor penting yang menjadi fokus dalam dinamika hubungan bilateral ini adalah bidang keimigrasian,

terutama karena mobilitas warga negara kedua negara yang sangat tinggi dan terus meningkat seiring perkembangan globalisasi.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, kerja sama dalam bidang keimigrasian tidak hanya dipahami sebagai urusan administratif belaka, melainkan telah menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, mendorong integrasi kawasan, serta menjamin kemudahan dan kenyamanan mobilitas lintas negara. Kerja sama keimigrasian ini menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada tuntutan masyarakat internasional terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran lalu lintas orang antarnegara, menjaga keamanan perbatasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan teknologi.

Salah satu aspek penting dalam kerja sama keimigrasian tersebut adalah optimalisasi teknologi dalam pembuatan paspor dan visa. Dokumen perjalanan ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi warga negara, tetapi juga sebagai instrumen utama yang merepresentasikan kedaulatan negara dalam mengatur keluar-masuknya orang dari dan ke wilayahnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen perjalanan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai inovasi berbasis digital, seperti pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), online visa approval, serta berbagai bentuk layanan daring lainnya yang

bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses permohonan paspor dan visa (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023b). Inisiatif ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

Secara geografis, Kota Tanjungpinang yang terletak di wilayah perbatasan bagian barat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia. Kota ini kerap menjadi pintu gerbang bagi mobilitas antarnegara melalui jalur laut dan pelabuhan internasional yang menghubungkan wilayah Kepulauan Riau dengan Semenanjung Malaysia. Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dalam hal ini memegang peranan vital, karena bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan paspor dan visa bagi warga negara Indonesia maupun warga asing yang keluar masuk melalui wilayah tersebut. Dengan tingginya intensitas lalu lintas perbatasan, maka dibutuhkan sistem pelayanan keimigrasian yang mampu merespons dinamika secara cepat, terintegrasi, serta memanfaatkan teknologi yang andal untuk menjamin keamanan dan kelancaran pergerakan penduduk.

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ini tidak hanya mencakup koordinasi administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis seperti pertukaran data keimigrasian, interoperabilitas sistem digital, serta harmonisasi kebijakan keimigrasian yang disesuaikan dengan tantangan kawasan. Hal ini penting, mengingat berbagai tantangan keimigrasian yang bersifat lintas batas seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, atau pelanggaran izin tinggal memerlukan penanganan kolaboratif antarnegara. Dalam perspektif keamanan non-

tradisional, isu keimigrasian telah menjadi bagian dari isu strategis regional yang tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional. Maka dari itu, teknologi dalam pelayanan keimigrasian bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan juga representasi dari upaya negara dalam membangun sistem yang adaptif, akuntabel, dan tangguh terhadap ancaman zaman.

Kendati demikian, implementasi teknologi dalam pelayanan keimigrasian juga menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kesiapan integrasi sistem antarnegara. Beberapa wilayah, terutama di daerah perbatasan, masih menghadapi keterbatasan jaringan digital dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur keimigrasian dalam mengoperasikan sistem digital menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Kerja sama lintas negara juga menghadapi hambatan dalam hal sinkronisasi regulasi, keamanan data, dan kesiapan politik antarnegara yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana bentuk kerja sama Indonesia-Malaysia dalam optimalisasi teknologi pembuatan paspor dan visa, khususnya di wilayah perbatasan seperti Tanjungpinang. Penelitian ini tidak hanya akan menguraikan dinamika kerja sama yang telah berlangsung, tetapi juga mengevaluasi capaian serta kendala yang dihadapi di lapangan. Fokus utama diarahkan pada peran Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang sebagai aktor pelaksana kebijakan yang berada di garda terdepan

pelayanan publik, serta bagaimana lembaga ini mengimplementasikan sistem dan teknologi yang telah dikembangkan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan kebijakan keimigrasian berbasis teknologi informasi, serta memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menciptakan sistem keimigrasian yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga aman, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang, fokus utama penelitian ini adalah: bagaimana upaya implementasi kerja sama Indonesia – Malaysia dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan pembuatan paspor dan visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi di bidang pengawasan imigrasi. Dengan teknologi yang tepat, proses pemantauan dan pelayanan seperti registrasi, pengurusan visa pendatang, dan izin tinggal dapat dilakukan lebih cepat dan bebas kesalahan. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses setiap permohonan dan meningkatkan produktivitas petugas imigrasi. Optimalisasi penggunaan teknologi, khususnya sistem digital dan otomasi, dapat lebih menjamin keakuratan data yang dikumpulkan selama penegakan imigrasi.

Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan data, mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan data, dan mencegah potensi penipuan dan pemalsuan dokumen, yang biasa terjadi dalam proses imigrasi. Salah satu manfaat utama dari optimalisasi teknologi adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas otoritas imigrasi. Sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi secara otomatis mencatat setiap langkah pelayanan, sehingga memudahkan otoritas dan masyarakat untuk memantau prosesnya. Hal ini mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di otoritas imigrasi. Penelitian ini akan mempunyai manfaat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat setempat.

Aplikasi berbasis teknologi memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses informasi tentang layanan imigrasi, mendaftar atau melamar secara online, dan melacak status permohonannya. Hal ini tentunya akan mengurangi antrean panjang dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan imigrasi. Manfaat lain dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pengawasan imigrasi. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan sistem pengawasan berbasis Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk memantau pergerakan orang, arus masuk dan keluar negara, dan aktivitas mencurigakan. Penerapan teknologi yang tepat akan membuat pemantauan menjadi lebih akurat dan cepat, sehingga memungkinkan Anda mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Studi ini juga memberikan manfaat dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi ketika menerapkan teknologi di sektor imigrasi sebagai berikut: B. Infrastruktur yang terbatas, pelatihan personel yang tidak memadai, atau masalah

peraturan. Memahami kendala-kendala tersebut memungkinkan kami mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada dan menerapkan teknologi secara lebih optimal.

Temuan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam pengembangan sistem imigrasi berbasis teknologi. Temuan studi ini dapat memberikan dasar untuk merancang kebijakan yang lebih baik mengenai penggunaan teknologi untuk pemantauan dan layanan migrasi, dan untuk meningkatkan keberlanjutan dan adaptasi teknologi dalam jangka panjang.

### **1.3 Manfaat penelitian**

Penelitian ini membawa berbagai manfaat, di antaranya mempercepat proses administrasi dalam pengurusan paspor dan visa, yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat, sekaligus membangun citra positif kantor imigrasi. Pemanfaatan teknologi juga membantu dalam pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih efisien dengan menekan beban administratif, sehingga fokus kerja dapat diarahkan pada tugas yang lebih strategis. Selain itu, hasil penelitian ini mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan publik di sektor keimigrasian serta memperkuat sistem pengawasan dan keamanan data untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen. Tak hanya itu, penggunaan teknologi juga mempercepat proses kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan paspor dan visa secara lintas negara.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam konteks keamanan non-tradisional melalui pendekatan Human Security dan Critical Security Studies. Dengan mengangkat isu optimalisasi teknologi dalam pelayanan paspor dan visa di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa keamanan tidak hanya terbatas pada aspek militer atau negara, tetapi juga mencakup perlindungan individu dari ancaman administratif dan struktural yang menghambat mobilitas dan hak dasar warga negara. Melalui lensa Human Security, studi ini menyoroti pentingnya jaminan akses, keadilan, dan efisiensi layanan publik sebagai bagian dari perlindungan manusia (UNDP, 1994). Sementara itu, pendekatan Critical Security Studies memperkaya analisis dengan mempertanyakan struktur kekuasaan dan kebijakan negara dalam sistem imigrasi, serta menekankan perlunya perubahan paradigma dari sekuritisasi konvensional menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif (Booth, 2005). Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keamanan manusia serta mendorong kolaborasi lintas negara yang lebih adil dan efektif.